

## ***Strengthening Criminal Law Literacy among Law Students through Educational Activities in Labuhan Haji, East Lombok***

### **Penguatan Literasi Hukum Pidana bagi Mahasiswa Hukum melalui Kegiatan Edukasi di Labuhan Haji, Lombok Timur**

**Aryadi Almau Dudy\*<sup>1</sup>, Suheflihusnaini Ashady,<sup>2</sup> Prandy Arthayoga Louk Fanggi<sup>3</sup>, Maulana Syekh Yusuf<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Indonesia

<sup>4</sup> Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Prodi Hukum, Universitas Bumigora, Indonesia.

E-mail Korespondensi: aryadi.almaududy@unram.ac.id

#### **Abstract**

*Criminal law plays an essential role in maintaining public order and upholding justice in society; therefore, adequate legal understanding is particularly important for law students as future legal practitioners and scholars. However, limitations in criminal law literacy are still found among law students, both in understanding fundamental concepts and principles as well as the mechanisms of criminal law enforcement. This community service activity aims to strengthen criminal law literacy through educational programs for law students who are members of the East Lombok Law Students Community in Labuhan Haji, East Lombok. The methods employed include the delivery of legal materials and interactive discussions covering the definition and scope of criminal law, fundamental principles of criminal law, and criminal law enforcement mechanisms within the Indonesian criminal justice system. The results indicate an improvement in participants' understanding and legal awareness regarding the importance of criminal law and its fair and just application. It is expected that this activity will contribute to the formation of critical, ethical, and competent law students who are prepared to actively support the enforcement of criminal law in Indonesia.*

**Keywords:** *Criminal Law, Legal Literacy, Law Students, Community Service, Law Enforcement.*

#### **Abstrak**

*Hukum pidana memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan menegakkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga diperlukan pemahaman yang memadai, khususnya bagi mahasiswa hukum sebagai calon praktisi dan akademisi hukum. Namun, masih terdapat keterbatasan literasi hukum pidana di kalangan mahasiswa hukum, baik dalam memahami konsep dasar, asas, maupun mekanisme penegakan hukum pidana. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat literasi hukum pidana melalui kegiatan edukasi bagi mahasiswa hukum yang tergabung dalam Komunitas Mahasiswa Hukum Lombok Timur di Labuhan Haji, Lombok Timur. Metode yang digunakan meliputi penyampaian materi dan diskusi interaktif mengenai pengertian dan ruang lingkup hukum pidana, asas-asas hukum pidana, serta mekanisme penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum peserta terhadap pentingnya hukum pidana serta penerapannya secara adil dan berkeadilan. Diharapkan kegiatan ini dapat berkontribusi pada pembentukan mahasiswa hukum yang kritis, berintegritas, dan siap berperan aktif dalam mendukung penegakan hukum pidana di Indonesia.*

**Kata kunci:** *Hukum Pidana, Literasi Hukum, Mahasiswa Hukum, Pengabdian Kepada Masyarakat, Penegakan Hukum*

## **1. PENDAHULUAN**

Hukum pidana merupakan salah satu cabang hukum yang memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Pemahaman yang baik terhadap hukum pidana diperlukan tidak hanya bagi aparat penegak hukum, tetapi juga bagi

mahasiswa hukum sebagai calon praktisi dan akademisi hukum di masa depan. Namun demikian, masih ditemukan keterbatasan literasi hukum pidana di kalangan mahasiswa hukum, baik dalam memahami konsep dasar, asas-asas hukum pidana, maupun penerapannya dalam praktik penegakan hukum.

Mahasiswa hukum memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang diharapkan mampu menjembatani antara norma hukum dan realitas sosial. Akan tetapi, pemahaman hukum pidana yang masih bersifat normatif dan teoritis sering kali belum diimbangi dengan pemahaman kontekstual dan aplikatif. Kondisi ini dapat memengaruhi cara pandang mahasiswa hukum dalam menyikapi permasalahan pidana di masyarakat serta menghambat kontribusi mereka dalam membangun kesadaran hukum yang lebih luas.

Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, hukum pidana terus mengalami perkembangan, baik melalui pembaruan peraturan perundang-undangan maupun melalui putusan pengadilan. Perubahan tersebut menuntut mahasiswa hukum untuk memiliki literasi hukum pidana yang kuat dan mutakhir, sehingga mampu memahami dinamika hukum pidana secara komprehensif. Tanpa literasi yang memadai, mahasiswa hukum berpotensi mengalami kesulitan dalam menganalisis perkara pidana, memahami mekanisme proses peradilan pidana, serta menilai penerapan hukum pidana secara kritis dan objektif.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan pemahaman hukum pidana di kalangan mahasiswa hukum, khususnya terkait asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, jenis-jenis tindak pidana, serta peran dan kewenangan aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Kesenjangan ini dapat berdampak pada lemahnya kapasitas akademik dan praktis mahasiswa hukum dalam menghadapi persoalan hukum pidana yang kompleks.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan upaya edukatif yang sistematis melalui kegiatan penguatan literasi hukum pidana bagi mahasiswa hukum. Kegiatan edukasi ini dilaksanakan di Labuhan Haji, Lombok Timur, dengan melibatkan peserta dari **Komunitas Mahasiswa Hukum Lombok Timur** sebagai sasaran utama. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa hukum mengenai konsep, asas, dan penerapan hukum pidana, sekaligus membangun kesadaran kritis terhadap praktik penegakan hukum pidana di masyarakat.

Edukasi hukum pidana ini dirancang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif melalui diskusi interaktif, pemaparan studi kasus, serta pengenalan mekanisme sistem peradilan pidana. Dengan pendekatan tersebut, peserta diharapkan mampu mengaitkan teori hukum pidana dengan realitas praktik hukum, sehingga memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan kontekstual.

Melalui kegiatan penguatan literasi hukum pidana ini, diharapkan Komunitas Mahasiswa Hukum Lombok Timur memiliki kapasitas intelektual dan kesadaran hukum yang lebih baik dalam memahami dan menyikapi persoalan pidana. Dalam jangka panjang, kegiatan ini diharapkan dapat berkontribusi pada pembentukan generasi mahasiswa hukum yang kritis, berintegritas, serta mampu berperan aktif dalam mendukung penegakan hukum pidana yang adil dan berkeadilan di Indonesia.

## **2. METODE PELAKSANAAN**

Metode pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat bersama di Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat, yang dilaksanakan oleh beberapa rekan dosen dari Universitas Mataram dengan tema Penyuluhan Hukum tentang Kekerasan Seksual dan Mekanisme Penegakan Hukumnya bagi Masyarakat, dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut (Hotana, 2018):

### **1. Koordinasi**

Tahap koordinasi dilakukan komunitas mahasiswa dan perwakilan masyarakat sebagai mitra pelaksanaan kegiatan. Koordinasi ini bertujuan untuk menyepakati waktu, tempat, serta teknis pelaksanaan penyuluhan hukum, sekaligus mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan masyarakat terkait pemahaman kekerasan seksual dan penegakan hukumnya. Koordinasi awal juga dilakukan untuk menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan agar kegiatan penyuluhan dapat berjalan dengan efektif dan kondusif.

### **2. Studi Pustaka**

Tahap studi pustaka dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur, buku, peraturan perundang-undangan, serta sumber ilmiah lainnya yang berkaitan dengan kekerasan seksual dan mekanisme penegakan hukumnya. Kajian ini mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hukum pidana terkait, serta konsep perlindungan dan pemulihan korban. Hasil studi pustaka digunakan sebagai dasar penyusunan materi penyuluhan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan hukum yang berlaku.

### **3. Sosialisasi**

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan dengan komunitas mahasiswa dengan tema Penguatan Literasi Hukum Pidana bagi Mahasiswa Hukum melalui Kegiatan Edukasi di Labuhan Haji, Lombok Timur. Sosialisasi dilakukan secara tatap muka melalui penyampaian materi oleh tim pengabdian, yang meliputi pengertian dan bentuk-bentuk kekerasan seksual, hak-hak korban, kewajiban masyarakat, serta prosedur dan mekanisme penegakan hukum. Kegiatan ini diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab guna memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan, pengalaman, maupun permasalahan yang dihadapi terkait isu kekerasan seksual di lingkungan sekitar.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan tema “Penguatan Literasi Hukum Pidana dan Mekanisme Penegakan Hukumnya bagi Mahasiswa Hukum”. Kegiatan ini diselenggarakan di Labuhan Haji, Lombok Timur, dengan peserta utama berasal dari Komunitas Mahasiswa Hukum Lombok Timur. Keterlibatan komunitas mahasiswa hukum menjadi fokus utama kegiatan ini mengingat peran strategis mereka sebagai calon praktisi dan akademisi hukum dalam memahami, mengembangkan, serta mengimplementasikan hukum pidana secara adil dan bertanggung jawab.

Pelaksanaan kegiatan edukasi diawali dengan sesi pengenalan tim pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk pendekatan akademik dan persuasif untuk membangun suasana dialogis serta mempererat komunikasi dengan para peserta. Setelah sesi pengenalan, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi pertama yang membahas pengertian hukum pidana, ruang lingkup hukum pidana, asas-asas hukum pidana, serta tujuan pemidanaan dalam sistem

hukum Indonesia. Pada sesi ini, pemateri menekankan pentingnya hukum pidana sebagai instrumen negara dalam menjaga ketertiban umum dan menegakkan keadilan.

Materi inti kedua difokuskan pada mekanisme penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Pemateri menjelaskan tahapan proses hukum pidana, mulai dari penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Selain itu, dibahas pula peran dan kewenangan aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan hakim, serta pentingnya prinsip *due process of law* dan perlindungan hak asasi manusia dalam setiap tahapan proses pidana.

Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Para peserta dari Komunitas Mahasiswa Hukum Lombok Timur menunjukkan antusiasme yang tinggi dengan mengajukan berbagai pertanyaan terkait penerapan asas hukum pidana, analisis kasus pidana, serta tantangan penegakan hukum pidana di Indonesia. Diskusi ini memberikan ruang bagi peserta untuk mengembangkan pemikiran kritis dan kemampuan analisis hukum secara lebih mendalam.

Kegiatan edukasi kemudian ditutup dengan sesi dokumentasi bersama antara tim pemateri dan seluruh peserta. Melalui terlaksananya kegiatan penguatan literasi hukum pidana ini, diharapkan mahasiswa hukum, khususnya yang tergabung dalam Komunitas Mahasiswa Hukum Lombok Timur, memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hukum pidana dan mekanisme penegakannya. Pada akhirnya, kegiatan ini diharapkan mampu berkontribusi pada pembentukan generasi mahasiswa hukum yang berintegritas, kritis, dan profesional, serta siap berperan aktif dalam mendukung penegakan hukum pidana yang adil dan berkeadilan di Indonesia.







**Gambar 1:** Foto Dokumentasi Kegiatan Penyuluhan Pidana.

#### 4. KESIMPULAN

Kegiatan penguatan literasi hukum pidana yang dilaksanakan di Labuhan Haji, Lombok Timur, memberikan dampak positif bagi peningkatan pemahaman mahasiswa hukum yang tergabung dalam Komunitas Mahasiswa Hukum Lombok Timur. Melalui kegiatan edukasi ini, peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep dasar, asas, serta mekanisme penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Kegiatan ini juga mendorong terbentuknya pola pikir kritis dan kesadaran hukum mahasiswa hukum sebagai calon praktisi dan akademisi hukum. Oleh karena itu, kegiatan edukasi hukum pidana perlu dilakukan secara berkelanjutan guna memperkuat kapasitas akademik dan profesional mahasiswa hukum serta mendukung terwujudnya penegakan hukum pidana yang adil dan berkeadilan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Use the "Insert Citation" button to add citations to this document.